

ABSTRAK

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat miskin, pemerintah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional, akan tetapi masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat maupun provinsi. Berlandaskan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pati menganggarkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai program pendamping Jaminan Kesehatan Nasional. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati merupakan salah satu institusi yang turut berperan dalam pembangunan kesehatan dan penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten Pati. Dengan dasar itulah penulis ingin mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati terkait pelayanan kesehatan Jamkesda dan kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati beserta solusinya.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta wawancara staf Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati terkait pelayanan kesehatan Jamkesda meliputi pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan menjalin kerjasama kontrak dengan puskesmas dan rumah sakit, pengawasan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan Jamkesda dari segi kepesertaan Jamkesda dengan melaksanakan verifikasi data peserta Jamkesda, pengelolaan pelayanan kesehatan dengan melaksanakan verifikasi klaim pembayaran. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati juga telah menyusun kebijakan teknis berupa Petunjuk Teknis Integrasi Jamkesda Kabupaten Pati ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2017. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan Jamkesda meliputi kurangnya anggaran APBD untuk Jamkesda, kesadaran masyarakat untuk mempunyai Jamkes mandiri masih kurang, data peserta Jamkesda dari desa yang tidak terbuka dan sulitnya menjangkau rumah sakit penyedia Jamkesda.

Kata kunci: Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, Kabupaten Pati